

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis memberikan penjelasan awal terkait dengan latar belakang masalah di lapangan yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, pertanyaan penelitian, penjelasan istilah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi penulisan tesis.

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Untuk mengemban fungsi tersebut pemerintah menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Berdasarkan tujuan pendidikan nasional tersebut pendidikan merupakan usaha yang dilakukan secara terencana, terstruktur dan sistematis dalam membangun peserta didik menjadi manusia yang baik bagi diri dan lingkungan sosial, pendidikan juga berperan dalam membangun bangsa menghadapi perubahan sosial budaya dan globalisasi. Melalui pendidikan peserta didik memperoleh kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor.

Pelaksanaan pendidikan formal pada setiap jenjang mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi mengarah pada pencapaian tujuan pendidikan nasional. Adapun tujuan pendidikan menengah adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Tujuan pendidikan menengah kejuruan adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya.

Penyelenggaraan pendidikan menengah khususnya satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) diarahkan pada tujuan penyelenggaraan pendidikan menengah yang telah dirumuskan oleh pemerintah tersebut. Konsekuensinya SMA mesti menjamin mutu lulusannya agar memiliki keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.

Salah satu indikator pendidikan berkualitas adalah peserta didik meraih hasil belajar yang optimal dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Hasil belajar yang optimal dapat diperoleh dengan mengoptimalkan isi dan proses pembelajaran yang dilakukan dengan memperbaiki implementasi kurikulum. Pengertian implementasi kurikulum menurut Hamalik, O. (2008, hlm. 237) bahwa “implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam bentuk tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap”.

Menurut Katuuk, D. A. (2014, hlm. 16) implementasi kurikulum dapat dilihat sebagai suatu proses penerapan gagasan, ide, tujuan, dan keseluruhan program yang termuat di dalam suatu kurikulum.

Implementasi kurikulum juga dapat diartikan sebagai aktualisasi kurikulum tertulis (*written curriculum*) dalam bentuk pembelajaran. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan Miller dan Seller (dalam Hamalik, O., 2008, hlm. 237) bahwa “*in some case, implementation has been identified with instructional*”. Lebih lanjut dijelaskan bahwa implementasi kurikulum

merupakan suatu penerapan konsep, ide, program, atau tatanan kurikulum ke dalam praktek pembelajaran atau berbagai aktifitas baru, sehingga terjadi perubahan pada sekelompok orang yang diharapkan untuk berubah.

Dengan demikian, implementasi kurikulum adalah penerapan atau pelaksanaan program kurikulum yang telah dikembangkan dalam tahap sebelumnya, kemudian diujicobakan dengan pelaksanaan dan pengelolaan, sambil senantiasa dilakukan penyesuaian terhadap situasi lapangan dan karakteristik peserta didik, baik perkembangan intelektual, emosional serta fisiknya. Implementasi ini juga sekaligus merupakan penelitian lapangan (*field research*) untuk keperluan validasi sistem kurikulum itu sendiri.

Di dalam pengimplementasian kurikulum diperlukan komitmen dan kerjasama *stakeholders* sebagaimana dikatakan Marsh (dalam Hamalik, 2008, hlm. 239) bahwa “ada tiga faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum, yaitu dukungan kepala sekolah, dukungan rekan sejawat dan dukungan internal di dalam kelas”.

Sedangkan menurut Katuuk, D. A. (2014, hlm. 17-20) bahwa:

Faktor-faktor implementasi kurikulum merupakan kondisi yang akan mempengaruhi keberhasilan implementasi kurikulum. Faktor-faktor tersebut yaitu:

1. Faktor Perencanaan Implementasi Kurikulum.
2. Faktor Kurikulum.
3. Faktor Guru dalam Implementasi Kurikulum.
4. Faktor Sarana dan Prasarana.
5. Faktor Iklim dan Budaya Sekolah.
6. Faktor Peran Kepala Sekolah.

Guru adalah ujung tombak keberhasilan implementasi kurikulum, hal ini sejalan dengan pernyataan Katuuk, D. A. (2014, hlm. 18) bahwa guru mempunyai peranan yang penting dalam implementasi kurikulum. Peran guru tersebut terutama dalam menjadikan kurikulum sebagai sesuatu yang aktual (*actual curriculum*) dalam kegiatan pembelajaran.

Salah satu mata pelajaran muatan lokal yang merupakan mata pelajaran wajib di SMA Laboratorium Percontohan UPI Kota Bandung ialah mata pelajaran *English Conversation*. Mata pelajaran wajib merupakan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh seluruh peserta didik. Tujuan mata pelajaran *English Conversation* mencakup: (1) Mengembangkan kemampuan berkomunikasi (*speaking skill*) dalam bahasa Inggris baik lisan maupun tulis. Kemampuan tersebut meliputi mendengarkan (*listening skill*), berbicara (*speaking skill*), membaca (*reading skill*), dan menulis (*writing skill*), disamping itu juga menekankan pelafalan kata dalam bahasa Inggris (*pronunciation*); (2) Menumbuhkan kesadaran akan hakikat dan pentingnya bahasa Inggris sebagai salah satu bahasa asing untuk menjadi alat utama belajar; (3) Mengembangkan pemahaman keterkaitan antara bahasa dan budaya serta memperluas cakrawala budaya. Dengan demikian peserta didik memiliki wawasan lintas budaya dan melibatkan diri dalam keragaman budaya di era globalisasi.

Kurikulum muatan lokal untuk satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013.

Pengertian muatan lokal dan satuan pendidikan yang dimaksud menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 pada Pasal 1.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Muatan lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal.
2. Satuan pendidikan adalah Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), dan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK).

Adapun maksud dan tujuan dari muatan lokal menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 pada Pasal 2.

1. Muatan lokal merupakan bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal yang dimaksudkan untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap keunggulan dan kearifan di daerah tempat tinggalnya.
2. Muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajarkan dengan tujuan membekali peserta didik dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk:
 - a. mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial, budaya, dan spiritual di daerahnya; dan
 - b. melestarikan dan mengembangkan keunggulan dan kearifan daerah yang berguna bagi diri dan lingkungannya dalam rangka menunjang pembangunan nasional.

Jenis-jenis muatan lokal diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 pada Pasal 4.

- (1) Muatan lokal dapat berupa antara lain:
 - a. seni budaya,
 - b. prakarya,
 - c. pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan,
 - d. bahasa, dan/atau
 - e. teknologi.
- (2) Muatan pembelajaran terkait muatan lokal berupa bahan kajian terhadap keunggulan dan kearifan daerah tempat tinggalnya.
- (3) Muatan pembelajaran terkait muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan antara lain dalam mata pelajaran seni budaya, prakarya, dan/atau pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan.
- (4) Dalam hal pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan, muatan pembelajaran terkait muatan lokal dapat dijadikan mata pelajaran yang berdiri sendiri.

Terkait muatan lokal *English Conversation* pada SMA Laboratorium Percontohan UPI Kota Bandung yang diberlakukan selama ini, sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013.

Guru sebagai ujung tombak implementasi Kurikulum 2013 mempunyai peran yang sangat penting, maka dari itu guru wajib mempunyai kompetensi tentang Kurikulum 2013. Khususnya guru muatan lokal *English Conversation* memiliki kompetensi tentang muatan lokal Kurikulum 2013.

Pada hakikatnya kurikulum muatan lokal merupakan perwujudan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 38 ayat 1, yang berbunyi: “Pelaksanaan kegiatan pendidikan didasarkan atas kurikulum yang berlaku secara nasional dan kurikulum yang disesuaikan dengan keadaan serta kebutuhan lingkungan setempat dan ciri khas satuan pendidikan”.

Adapun regulasi kebijakan yang mengatur desentralisasi dalam bidang pendidikan salah satunya ialah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang sebagai suatu kebutuhan untuk menghadapi tantangan globalisasi. Otonomi daerah dalam bentuk desentralisasi untuk mendorong partisipasi pemerintah daerah, masyarakat, dan *stakeholders* mengembangkan daerah. Kebijakan desentralisasi pendidikan diharapkan mampu mengembangkan pendidikan hingga menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

Kebijakan desentralisasi pendidikan meningkatkan relevansi daerah dalam pembangunan nasional melalui peran serta daerah dalam bidang pendidikan, salah satunya melalui pengembangan kurikulum muatan lokal satuan pendidikan. Akan tetapi dalam tataran implementasi kurikulum muatan lokal satuan pendidikan ini belum maksimal. Maka implementasi kurikulum muatan lokal satuan pendidikan perlu ditingkatkan dan

disempurnakan. Tindak lanjut hal tersebut yaitu dengan mengoptimalkan faktor-faktor pendukung implementasi kurikulum.

Kesimpulan dari uraian di atas adalah tentang bagaimana peran penting *stakeholders* dalam implementasi kurikulum karena sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 1 ayat 19 yang berbunyi “kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman diselenggarakannya kegiatan pembelajaran pada satuan dan jenjang pendidikan dengan tujuan pendidikan tertentu”.

Hasil kajian pustaka menunjukkan perlunya dilakukan penelitian terhadap implementasi kurikulum muatan lokal *English Conversation* (Bahasa Inggris), adapun hasil-hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Aplebee, A.N. dan Purves, A.C. (1992), dalam buku yang berjudul *Literature and the English Language Arts*, mengupas perkembangan dan hubungan bahasa dan sastra Inggris serta teori dan riset tentang kurikulum bahasa, khususnya pada level pendidikan menengah. Penulis mengemas sajiannya atas tiga bagian. Bagian kesatu memaparkan sejarah kemunculan bahasa Inggris sebagai suatu bidang kurikulum di sekolah *United States of America* (USA), yang melewati empat tradisi. Keempat tradisi itu: (1) tradisi etik, yang menekankan belajar bahasa pada kegiatan membaca teks moral dan keagamaan, (2) tradisi analogi klasik, yang memfokuskan belajar bahasa pada memorisasi definisi dan kaidah bahasa, retorik dan orasi, karya sastra klasik, sejarah sastra, dan filologi, (3) tradisi non-akademik, yang menekankan pada keterampilan berbahasa dan menempatkan apresiasi sastra sebagai kegiatan ekstrakurikuler, serta (4) institusionalisasi kurikulum bahasa Inggris oleh *The Committee of Ten*, yang menempatkan bahasa Inggris sebagai salah satu dari sembilan bidang inti kurikulum. Bagian kedua artikel ini membahas dasar pemikiran yang mewarnai perkembangan kurikulum bahasa Inggris, yang meliputi: (1) reorientasi kurikulum bahasa dari kepentingan akademik ke kepentingan peserta didik, (2) kurikulum bahasa harus mengaktifkan siswa

dan membekali mereka dengan pengalaman dan kemampuan berbahasa yang bermanfaat bagi kepentingan hidup dan dunia kerja peserta didik (*progresivisme*), (3), kurikulum bahasa diarahkan pada penguasaan kemampuan komunikasi, (4) kurikulum bahasa akademik yang sangat menekankan pada pendekatan strukturalis dan transformasi bagi bahasa, serta *New Criticism* dalam sastra, (5) eklektivisasi kurikulum bahasa melalui pemaduan berbagai pemikiran sebelumnya, serta (6) kurikulum bahasa menekankan pada penguasaan keterampilan dan strategi berbahasa yang dapat mendukung proses belajar bahasa (*constructivisme Vygotsky*). Pada bagian akhir artikel ini, penulis mengulas pelbagai isu aktual tentang kurikulum bahasa dan diperkirakan akan terus berlanjut. Isu itu berkenaan dengan prinsip-prinsip umum kurikulum yang diwarnai oleh pemikiran konstruktivisme sosial, diferensiasi kurikulum, asesmen, peranan media non-cetak dan teknologi, serta muatan bahasa dan sastra dalam kurikulum bahasa.

Mellow, J.D. (2002), dalam artikel berjudul *Toward Principled Eclecticism in Language Teaching: The Two Dimensional Model and Centring Principle* mengusulkan prinsip-prinsip untuk mengelompokkan, memilih dan mengurutkan aktivitas belajar mengajar untuk mencapai tujuan penerapan prinsip-prinsip eklektisisme dalam pembelajaran bahasa. Aktivitas belajar mengajar diklasifikasikan ke dalam Model Dua Dimensi yang dalam bahasa berupa bentuk dan fungsi serta perkembangan bahasa dan belajar bahasa. Sementara *Centring Principle* berkaitan dengan seleksi dan penataan aktivitas dalam pelajaran yang mesti memelihara keterpaduan melalui pembelajaran unit dan keterlibatan peserta didik dalam konteks belajar. Penulis menyatakan bahwa penerapan prinsip eklektisisme dengan model dua dimensi dan *Centring Principle* dalam pembelajaran bahasa tidak mudah. Meskipun demikian, penggunaan model tersebut memiliki dampak yang cukup baik terhadap keterlibatan peserta didik dan hasil belajar.

Yati, R. (2010), dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa kebijakan daerah yang mendasari pemberlakuan mata pelajaran muatan lokal Bahasa Inggris belum secara tertulis, tahap perencanaan masih belum maksimal, tahap pelaksanaan belum ada kesesuaian antara silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan kegiatan yang dilaksanakan, evaluasi belum fokus dan daya dukung cukup memadai.

Lestari, S. (2012), dalam penelitiannya mengemukakan bahwa berdasarkan hasil penelitian menunjukkan: 1) Pengelolaan KML Bahasa Inggris di SDN Gondokusuman sudah berjalan dengan baik. Namun demikian, masih ada hal-hal yang perlu ditingkatkan, seperti mutu pendidik, ketercukupan fasilitas dan dana untuk meningkatkan mutu pembelajaran KML Bahasa Inggris. 2) Kendala dalam pengelolaan KML Bahasa Inggris di SDN Gondokusuman meliputi kendala yang terkait dengan siswa dan fasilitas. 3) Upaya mengatasi kendala tersebut adalah dengan cara, antara lain: membimbing dan menumbuhkan motivasi dengan menggunakan metode pembelajaran yang memotivasi dan disesuaikan dengan materi ajar dan berusaha melengkapi fasilitas pendidikan.

Kaltsum, H. U. (2014), dalam penelitiannya menemukan di perseptual tanggapan dari empat kategori guru, menunjukkan bahwa pada dasarnya mereka memahami pelaksanaan mata pelajaran Bahasa Inggris di Sekolah Dasar sangat penting karena berbagai alasan. Para guru setuju terhadap pelaksanaan mata pelajaran Bahasa Inggris di Sekolah Dasar selama itu dilakukan dengan serius dan profesional bukan sebagai kurikulum tambahan.

Ledger, S., dkk., (2014), dalam buku *Global to Local Curriculum Policy Processes: The Enactment of the International Baccalaureate in Remote International Schools*, mengeksplorasi dinamika proses kebijakan kurikulum yang terlibat dalam adopsi, produksi dan diberlakukannya Program International Baccalaureate Primer Tahun (IBPYP), diakreditasi oleh Baccalaureate Organization (IBO). Memberikan wawasan dalam kerangka pengambil tanggung jawab dari hubungan antara tingkat global, regional, nasional dan lokal dari proses kebijakan pendidikan. Hal ini

berdampak pada penelitian tentang pendidikan internasional, pendidikan jarak jauh dan proses kebijakan. The IBPYP adalah salah satu dari tiga program populer yang ditawarkan oleh IBO. Mengingat pertumbuhan eksponensial dari sekolah internasional yang disebabkan oleh dunia global yang terus berubah dan tenaga kerja yang terus bergerak, kebijakan kurikulum internasional menjadi lebih kompleks. Hal ini telah menyebabkan pengakuan kebutuhan untuk berbagai studi analisis kebijakan di lapangan. Studi yang disajikan dalam buku ini dikonseptualisasikan secara jelas. Dengan demikian, adopsi, produksi dan berlakunya IBPYO di tiga sekolah internasional jarak jauh telah diteliti. Penelitian ini juga membahas bagaimana fenomena sekolah internasional dan pelengkap sekolah terpencil atau bersaing dengan, satu sama lain. Hal ini menghasilkan pemahaman yang lebih baik dari kebijakan pendidikan menginformasikan baik sekolah internasional dan sekolah terpencil dan interkoneksi di antara keduanya.

Siswanto, A.H. (2014), dalam penelitiannya mengemukakan hasil penelitian persiapan pembelajaran muatan lokal Bahasa Inggris berbasis karakter terkait dengan dokumen Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kelulusan, dan Panduan Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar semuanya telah tersedia. Pelaksanaan pembelajaran muatan lokal Bahasa Inggris berbasis karakter telah terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari proses rangkaian kegiatan belajar mengajar sesuai dengan RPP yang dipersiapkan guru, sedangkan evaluasi pembelajaran muatan lokal Bahasa Inggris berbasis karakter belum dilaksanakan secara maksimal.

Munif, D. N. (2015), dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa dalam implementasi Kurikulum 2013 mata pelajaran Bahasa Inggris di SMP Negeri 9 Madiun belum berjalan secara maksimal. Hal itu disebabkan oleh persepsi guru yang kurang baik mengenai Kurikulum 2013. Persepsi yang kurang baik berdampak pada perencanaan pembelajaran yang dibuat guru. Beberapa komponen dalam perencanaan pembelajaran belum dibuat secara maksimal. Hal ini berdampak pada pelaksanaan pembelajaran yang kurang maksimal dan juga pengaruh dari siswa dan sarana prasarana yang ada di sekolah menjadi kendala dalam kegiatan pembelajaran. Untuk itu diperlukan upaya-upaya untuk mengatasi kendala dalam kegiatan pembelajaran sehingga kendala dalam kegiatan pembelajaran dapat diatasi dan kompetensi dari pembelajaran dapat tercapai.

Berdasarkan hasil kajian pustaka, ditemukan beragam permasalahan dalam implementasi kurikulum muatan lokal khususnya muatan lokal Bahasa Inggris (*English Conversation*) dan perlu untuk dicarikan solusi terkait permasalahan dalam implementasi kurikulum berdasarkan bidang keilmuan pengembangan kurikulum. Hasil penelitian belum dapat menjawab kebutuhan *stakeholders* khususnya tentang bagaimana kebutuhan peserta didik, dan karakteristik daerah.

Sekolah sebagai tempat program pendidikan dilaksanakan merupakan bagian dari masyarakat. SMA merupakan jenjang yang cukup tepat dengan usia peserta didik berkisar 16-19 tahun, dan dianggap cukup baik untuk menanamkan berbagai nilai dan sikap perilaku kehidupan sebelum ia memasuki usia dewasa. Oleh karena itu, program pendidikan di sekolah perlu memberikan wawasan yang luas pada peserta didik tentang kekhususan yang ada di lingkungannya. Standar Isi yang seluruhnya telah disusun secara terpusat tidak mungkin dapat mencakup seluruh muatan lokal tersebut, sehingga perlu disusun muatan lokal sesuai dengan karakteristik daerahnya.

Kota Bandung dengan aktivitas sebagai kota metropolitan dengan berbagai kesibukan aktivitas sebagai Ibukota Provinsi Jawa Barat juga berpotensi sebagai kota jasa dan pariwisata sebagai pendukung perekonomian nasional. Kondisi dan potensi yang dimiliki daerah ini membawa pengaruh kepada perkembangan bahasa yang digunakan untuk keperluan tersebut. Terutama bahasa yang digunakan untuk keperluan berbagai aktivitas yang dimaksud.

Bahasa Inggris sebagai bahasa kedua setelah bahasa Indonesia tentunya dianggap dapat mengakomodir kebutuhan perkembangan daerah dan masyarakat di kota ini. Mengingat daerah ini sangat berpotensi dalam penyiapan tenaga kerja yang terampil dan bersaing, tentunya telah menjadi suatu keharusan bahwa tenaga yang dimaksud adalah kompetensi *plus* yang dapat menguasai bahasa Inggris.

Masyarakat sekolah sebagai bagian dari aktivitas pendidikan dalam peningkatan mutu sosial pendidikan secara praktis dapat dianggap menentukan langkah yang paling strategis dalam memberi kontribusi pada masyarakat secara umum dan juga pemerintah daerah, karena pada akhirnya pelaksana pembangunan adalah masyarakat yang memiliki kompetensi tertentu. Kompetensi merupakan modal dari sumber daya manusia.

Usia peserta didik SMA merupakan generasi yang akan memasuki usia dewasa dan menjadi bagian dari masyarakat. Sukmadinata, N. S. (2008, hlm. 58) mengemukakan bahwa kurikulum dapat dipandang sebagai suatu rancangan pendidikan, kurikulum menentukan pelaksanaan dan hasil pendidikan. Pendidikan pada intinya mempersiapkan generasi muda untuk terjun ke dunia masyarakat yang dapat memberikan bekal pengetahuan, keterampilan serta nilai-nilai untuk hidup, bekerja, dan mencapai perkembangan lebih lanjut di masyarakat. Keterkaitannya antara dunia pendidikan dengan dunia industri, pariwisata dan kota transit dengan peserta didik sangat erat, sebagai bekal untuk menyongsong hari depan yang dapat diterima, yaitu setidaknya untuk menjembatani keterasingan peserta didik terhadap potensi daerah sekitarnya.

Dalam kaitannya dengan kondisi daerah tertentu analisis kebutuhan (*need assesment*) dalam pengembangan kurikulum sangat diperlukan. Menurut Oliva, P. F. (1992, hlm. 246) “*a curriculum need assesment is a process for identifying programmatic needs that must be addressed by curriculum planners*”. Analisis kebutuhan digunakan untuk meneliti dan mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh peserta didik dan masyarakat dalam pengembangan kurikulum, karena pengembangan kurikulum pada hakikatnya berorientasi pada kebutuhan peserta didik (*need of learners*) dan kebutuhan masyarakat (*need of society*), termasuk kebutuhan mata pelajaran (*need subject matters*). Analisis kebutuhan, juga digunakan untuk mengidentifikasi *gap* atau ketidaksesuaian antara performansi peserta didik yang diinginkan (*das sollen*) dengan performansi peserta didik dalam kehidupan nyata (*das sein*).

Dari pengamatan penulis terhadap pengembangan kurikulum muatan lokal *English Conversation* belum memperhatikan dan mempersiapkan peserta didik untuk memiliki kemampuan-kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan lingkungannya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya:

Pertama, muatan lokal *English Conversation* pada satuan SMA di wilayah Dinas Pendidikan Kota Bandung hingga saat ini belum ada, yang ada dan sedang dilaksanakan adalah muatan lokal Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) dan Bahasa Sunda. Muatan lokal *English Conversation* adalah muatan lokal tingkat satuan pendidikan yang merupakan mata pelajaran wajib di SMA Laboratorium Percontohan UPI Kota Bandung, dengan tujuan mengakomodasi kebutuhan lingkungan sekolah.

Kedua, berdasarkan pengamatan penulis dari beberapa informasi yang diperoleh dari opini masyarakat, dan dari guru yang intensif berkomunikasi dengan peserta didik dapat menyimpulkan bahwa sebagian besar hasil pembelajaran mata pelajaran *English Conversation* peserta didik tidak mencapai Standar Ketuntasan Belajar Minimal (SKBM) atau Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), terutama dalam kemampuan berbahasa secara

praktis yang dapat diucapkan sehari-hari. Idealnya, paling tidak mereka dapat mengucapkan kalimat atau kata minimal dalam bahasa peserta didik dari tingkatan yang paling sederhana yaitu kalimat singkat misalnya dapat diucapkan sehari-hari tentang kegiatan peserta didik yang dilaksanakan di sekolah.

Ketiga, pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru belum mengarah pada praktek berbahasa. Peserta didik dihadapkan pada penyajian materi yang sifatnya teoritis dengan porsi penyajian lebih banyak mengerjakan tugas-tugas berdasarkan buku teks pelajaran. Tidak pada kecakapan langsung pada objeknya berupa pembelajaran yang komunikatif. Padahal rambu-rambu Pedoman Penyusunan dan Pengelolaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada Kurikulum 2013 bahwa muatan lokal dihindarkan dari pembelajaran yang bersifat teoritis dan diarahkan kepada pembelajaran bersifat praktek. Oleh karena itu tidak dikehendaki atau dihindari adanya pemberian Pekerjaan Rumah (PR) bagi peserta didik.

Implementasi kurikulum muatan lokal *English Conversation* pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh seluruh peserta didik di SMA Laboratorium Percontohan UPI Kota Bandung, dalam hal ini guru sebagai pelaksana secara langsung. Karena itu guru sebagai implementator kurikulum merupakan kunci yang paling utama untuk dapat mewujudkan tujuan seperti yang diharapkan. Guru mempunyai peranan yang sangat besar dan penting untuk menjadi faktor yang mendapat perhatian utama. Oleh karena baik buruknya sebuah kurikulum pada akhirnya bermuara dan kembali kepada seorang guru yang berdiri dihadapan para peserta didiknya. Kemahiran dan kreativitas guru sebagai perencanan dan pelaksana kurikulum itu sendiri sangat diperlukan.

Dalam pengembangan kurikulum muatan lokal *English Conversation*, guru diberi keleluasaan untuk mengembangkan rambu-rambu oleh Kepala Sekolah dan Badan Pengelola Sekolah (BPS). Adapun keberhasilannya akan sangat bergantung kepada kinerja guru. Sanjaya, W. (2009, hlm. 17) menulis bahwa “ibarat kedua sisi mata uang tidak dapat terpisahkan keduanya”.

Kurikulum dan implementasi sama pentingnya. Senada dengan ungkapan Sukmadinata, N. S. (2008, hlm. 19) bahwa “sebagus apapun kurikulum itu dibuat, tetapi hasilnya sangat bergantung pada apa yang dilakukan guru di kelas”. Dengan demikian guru memegang peran penting dalam menyusun dan merealisasikan proses pembelajaran di kelas.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan seperti yang digambarkan di atas penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai permasalahan tersebut dengan judul penelitian “Studi tentang Implementasi Kurikulum Muatan Lokal *English Conversation* (Penelitian Kualitatif pada SMA Laboratorium Percontohan UPI Kota Bandung)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana proses implementasi kurikulum muatan lokal *English Conversation* pada SMA Laboratorium Percontohan UPI Kota Bandung.

Dari rumusan di atas dapat dijabarkan menjadi sub-sub masalah sebagai berikut:

1. Perencanaan kurikulum dalam muatan lokal *English Conversation* pada SMA Laboratorium Percontohan UPI Kota Bandung yang meliputi ide/gagasan, kebijakan, dokumen kurikulum (kompetensi dasar, silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran/RPP, serta buku teks pelajaran), bahan ajar, pengelolaan kelas, pembelajaran individual, program remedial dan pengayaan.
2. Pelaksanaan kurikulum dalam muatan lokal *English Conversation* pada SMA Laboratorium Percontohan UPI Kota Bandung.
3. Evaluasi kurikulum dalam muatan lokal *English Conversation* pada SMA Laboratorium Percontohan UPI Kota Bandung.
4. Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi kurikulum muatan lokal *English Conversation* pada SMA Laboratorium Percontohan UPI Kota Bandung.

C. Pertanyaan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, permasalahan ini ditajamkan lagi dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan kurikulum dalam implementasi muatan lokal *English Conversation* pada SMA Laboratorium Percontohan UPI Kota Bandung yang meliputi ide/gagasan, kebijakan, dokumen kurikulum (kompetensi dasar, silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran/RPP, serta buku teks pelajaran), bahan ajar, pengelolaan kelas, pembelajaran individual, program remedial dan pengayaan?
2. Bagaimana pelaksanaan kurikulum dalam implementasi muatan lokal *English Conversation* pada SMA Laboratorium Percontohan UPI Kota Bandung?
3. Bagaimana evaluasi kurikulum dalam implementasi muatan lokal *English Conversation* pada SMA Laboratorium Percontohan UPI Kota Bandung?
4. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi kurikulum muatan lokal *English Conversation* pada SMA Laboratorium Percontohan UPI Kota Bandung?

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari timbulnya penafsiran ganda, penjelasan istilah khusus yang digunakan dalam penelitian ini untuk meminimalisir kerancuan dalam memahami pembahasan. Pendefinisian dari istilah implementasi kurikulum muatan lokal *English Conversation* pada SMA Laboratorium Percontohan UPI Kota Bandung, meliputi deskripsi berikut ini:

1. Implementasi Kurikulum

Pengertian kurikulum menurut Muhaimin (dalam Mubarak, R., 2013, hlm. 27) bahwa “kurikulum dalam arti yang sempit merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Pengertian ini menggaris bawahi adanya empat komponen pokok dalam kurikulum, yaitu tujuan, isi/bahan, organisasi dan strategi”.

Sedangkan pengertian kurikulum secara luas, kurikulum merupakan segala kegiatan yang dirancang oleh lembaga pendidikan untuk disajikan kepada peserta didik guna mencapai tujuan pendidikan (institusional, kurikuler, dan instruksional) (Mubarak, R., 2013, hlm. 27).

Sejalan dengan pengertian kurikulum tersebut, Hamalik, O. (2006, hlm. 123) mengemukakan pengertian implementasi kurikulum yaitu “implementasi kurikulum adalah operasionalisasi konsep kurikulum yang masih bersifat tertulis menjadi aktual ke dalam kegiatan pembelajaran”.

Dari pengertian yang telah dikemukakan di atas maka implementasi kurikulum dapat dimaknai sebagai operasionalisasi konsep kurikulum (perencanaan kurikulum, pelaksanaan kurikulum, dan evaluasi kurikulum) ke dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran.

2. Muatan Lokal *English Conversation*

Muatan lokal *English Conversation* merupakan mata pelajaran wajib di SMA Laboratorium Percontohan UPI Kota Bandung. Tujuan muatan lokal *English Conversation* mencakup: (1) Mengembangkan kemampuan berkomunikasi (*communication skill*) dalam Bahasa Inggris baik lisan maupun tulis. Kemampuan tersebut meliputi mendengarkan (*listening skill*), berbicara (*speaking skill*), membaca (*reading skill*), dan menulis (*writing skill*), disamping itu juga menekankan pelafalan dalam bahasa Inggris (*pronunciation*); (2) Menumbuhkan kesadaran akan hakikat dan pentingnya bahasa Inggris sebagai salah satu bahasa asing untuk menjadi alat utama belajar; (3) Mengembangkan pemahaman keterkaitan antara bahasa dan budaya serta memperluas cakrawala budaya. Dengan demikian peserta didik memiliki wawasan lintas budaya dan melibatkan diri dalam keragaman budaya di era globalisasi.

E. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini secara garis besar memiliki tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai implementasi kurikulum muatan lokal *English Conversation* pada SMA Laboratorium Percontohan UPI Kota Bandung. Tujuan penelitian tersebut untuk mendeskripsikan dan menganalisis sehingga kemudian dapat:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis proses perencanaan kurikulum dalam implementasi muatan lokal *English Conversation* pada SMA Laboratorium Percontohan UPI Kota Bandung.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis proses pelaksanaan kurikulum dalam implementasi muatan lokal *English Conversation* pada SMA Laboratorium Percontohan UPI Kota Bandung.
3. Mendeskripsikan dan menganalisis proses pelaksanaan evaluasi kurikulum dalam implementasi muatan lokal *English Conversation* pada SMA Laboratorium Percontohan UPI Kota Bandung.
4. Mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi kurikulum muatan lokal *English Conversation* pada SMA Laboratorium Percontohan UPI Kota Bandung.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara keilmuan (teoritis) maupun secara empirik (praktis).

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang pengembangan kurikulum terutama yang berhubungan dengan implementasi kurikulum muatan lokal *English Conversation* pada SMA Laboratorium Percontohan UPI Kota Bandung.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat tentang implementasi kurikulum muatan lokal *English Conversation* pada SMA Laboratorium Percontohan UPI Kota Bandung, selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

- a. Bagi penulis, mendapatkan ilmu pengetahuan empirik karena dapat mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang dipelajari selama masa kuliah.
- b. Bagi SMA Laboratorium Percontohan UPI Kota Bandung dapat menjadi bahan masukan yang berharga khususnya bagi guru untuk dapat mengimplementasikan kurikulum muatan lokal *English Conversation* serta dapat meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.
- c. Bagi pihak Badan Pengelola Sekolah (BPS), sebagai salah satu sumber dalam menentukan kebijakan dalam implementasi kurikulum muatan lokal *English Conversation* pada SMA Laboratorium Percontohan UPI Kota Bandung.
- d. Bagi Program Studi Pengembangan Kurikulum, dapat menjadi masukan dan informasi terkait implementasi kurikulum, khususnya implementasi kurikulum muatan lokal *English Conversation* pada SMA Laboratorium Percontohan UPI Kota Bandung.
- e. Bagi peneliti bidang sejenis, dapat dijadikan bahan kajian penelitian lebih lanjut dalam melakukan penelitian yang lebih luas dan mendalam mengenai implementasi kurikulum muatan lokal *English Conversation* pada SMA Laboratorium Percontohan UPI Kota Bandung.

G. Struktur Organisasi Penulisan Tesis

Sistematika penulisan tesis ini mengacu pada Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 5804/Un40/Hk/2015 tentang Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UPI Tahun Akademik 2015.

Tesis yang nantinya dikembangkan terdiri dari lima (5) bab, yakni: (1) bab pendahuluan, (2) bab kajian pustaka, (3) bab metode penelitian, (4) bab hasil penelitian dan pembahasan, serta (5) bab kesimpulan dan rekomendasi. Pada bab pendahuluan secara rinci mendeskripsikan latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, penjelasan istilah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur organisasi penulisan tesis.

Pada bab selanjutnya kajian pustaka berisikan tentang konsep implementasi kurikulum, konsep muatan lokal Kurikulum 2013, muatan lokal Kurikulum 2013 pada pendidikan menengah, dan penelitian terdahulu yang relevan.

Bab berikutnya merupakan metode penelitian yang mencakup lokasi dan subjek penelitian, pendekatan dan metode penelitian, penjelasan istilah, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, uji validitas data penelitian, dan tahap-tahap pelaksanaan penelitian di lapangan. Pada bab selanjutnya yaitu bab tentang hasil penelitian dan pembahasan yang mencakup tentang gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi hasil penelitian, dan pembahasan hasil penelitian. Bab terakhir merupakan bab kesimpulan dan rekomendasi yang menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap analisis temuan penelitian.